20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 43/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
MANUAL STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024

tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	MANUAL STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Manual Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

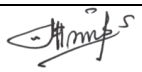
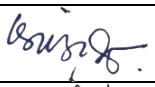
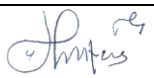
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

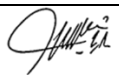
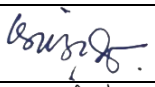
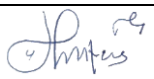
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Menjamin pelaksanaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam kegiatan pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dan mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Kegiatan penetapan pendanaan PkM dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:
1. Penetapan dana PkM tahunan;
2. Penetapan mekanisme pengelolaan dan pencairan dana PkM;
3. Penetapan mekanisme pertanggungjawaban dana PkM.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Standar pendanaan PkM adalah standar minimal terkait dengan penyediaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM di Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Tugas Rektor;
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja
SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyediakan template/format Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Membuat rumusan manual penetapan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor;
3. Mengusulkan Kelompok Kerja untuk menyusun standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar.</td><td>Template Standar
Template Manual Penetapan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Surat usulan Kelompok Kerja kepada Rektor</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kelompok Kerja</td><td>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya;
3. Merumuskan draf awal standar</td><td>Dokumen perumusan standar
Draf Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
</table>

			Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD; 4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	
	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya; 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar; 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	Draf Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Materi sosialisasi
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja; 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 3. Kepala LPPM 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Penetapan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat - Daftar Hadir Rapat Penyusunan Standar - Form Notulen Rapat			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

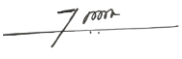
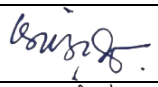
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Sebagai pedoman dalam menyediakan dan mengelola dana PkM yang memenuhi standar pendanaan PkM;
2. Agar pendanaan PkM berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan visi dan misi Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Manual ini meliputi:
1. Perencanaan dan penetapan dana PkM tahunan;
2. Pencairan dan penggunaan dana PkM;
3. Pertanggungjawaban penggunaan dana PkM;
4. Pengembangan sumber dana eksternal PkM.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, dan patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td colspan="2">Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td colspan="2">1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang pelaksana standar pendanaan PkM;
2. Mengesahkan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</td><td>Surat Tugas Rektor
SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPPM</td><td colspan="2">1. Menyusun rencana kebutuhan dana PkM tahunan berdasarkan program PkM;
2. Menetapkan besaran dana setiap usulan PkM sesuai hasil penilaian dan anggaran yang tersedia;
3. Memantau penggunaan dana PkM dan menerima laporan pertanggungjawaban.</td><td>Rencana kebutuhan dana PkM
Daftar penerima dana PkM</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Wakil Rektor II</td><td colspan="2">1. Menyetujui alokasi dana PkM dalam rencana kerja dan anggaran tahunan;
2. Mengupayakan sumber dana eksternal bersama LPPM.</td><td>Persetujuan alokasi dana PkM</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kepala Bagian Keuangan</td><td colspan="2">1. Mencairkan dana PkM sesuai persetujuan;
2. Memeriksa kelengkapan bukti penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. Menyusun laporan realisasi dana PkM.</td><td>Bukti pencairan dana
Laporan realisasi dana PkM</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="2">1. Mengusulkan kebutuhan dana PkM program studi;
2. Memantau penggunaan dana PkM oleh dosen di program studinya.</td><td>Usulan anggaran PkM program studi</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Dosen</td><td colspan="2">1. Menyusun rencana anggaran biaya dalam proposal PkM;
2. Menggunakan dana sesuai rencana anggaran biaya dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban.</td><td>Rencana Anggaran Biaya PkM
Laporan Pertanggungjawaban Dana PkM</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan</td><td colspan="4">1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Wakil Rektor II
3. Kepala LPPM
4. Kepala Bagian Keuangan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen</td></tr>
<tr><td>6. Catatan</td><td colspan="4">Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
</table>

	- Formulir Rencana Anggaran Biaya PkM - Formulir Permohonan Pencairan Dana PkM - Formulir Laporan Pertanggungjawaban Dana PkM
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM);
2. Untuk memastikan pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dapat dikendalikan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">1. Pemantauan dan pengecekan pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) agar berjalan dengan baik;
2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar;
2. Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di Institut Binamadani Indonesia (INBI);
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan kegiatan telah berjalan sesuai dengan isi standar.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Mengevaluasi ketersediaan dan serapan dana PkM setiap tahun;
2. Menganalisis ketercapaian indikator standar pendanaan PkM;
3. Menyusun laporan evaluasi pendanaan PkM.</td><td>Laporan evaluasi pendanaan PkM</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala Bagian Keuangan</td><td>1. Menyampaikan laporan realisasi dan serapan dana PkM;
2. Memeriksa kesesuaian penggunaan dana dengan rencana anggaran biaya.</td><td>Laporan realisasi dana PkM</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Memantau dosen yang menerima dana PkM;
2. Memberikan masukan mengenai mekanisme pendanaan PkM kepada LPPM.</td><td>Laporan pemantauan program studi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Dosen</td><td>1. Menerima masukan dari hasil evaluasi pendanaan PkM;
2. Melakukan perbaikan pertanggungjawaban sesuai hasil evaluasi yang diberikan.</td><td>Dokumen perbaikan</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Melakukan audit mutu internal;
2. Melaporkan hasil audit mutu internal;
3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan PkM.</td><td>Laporan Audit Mutu Internal
Dokumen sosialisasi</td></tr>
<tr><td>5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan</td><td colspan="4">1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Wakil Rektor I
3. Kepala LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Kepala LPM
6. Dosen</td></tr>
<tr><td>6. Catatan</td><td colspan="4">Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Evaluasi Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Formulir Hasil Evaluasi</td></tr>
</table>

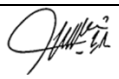
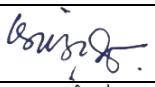
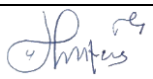
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT BINAMADANI

INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

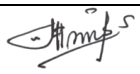
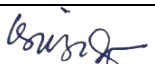
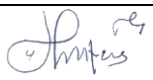
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual	1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM); 2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).			
2. Luas Lingkup	1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM); 2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi.			
3. Daftar Istilah	1. Perbaikan/koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian; 2. Tindakan koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya; 3. Pengendalian ketidaksesuaian adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian; 4. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan dan target yang harus dicapai.			
4. Langkah-langkah Prosedur	**No**	**Subyek/ Pelaku**	**Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan**	**Dokumen**
	1	Rektor	1. Rektor mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang, misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar; 2. Tindakan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal; 3. Menetapkan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, apabila terdapat standar yang belum tercapai sesuai target dan tindakan korektif tersebut diberlakukan di tingkat Institut.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut
	2	Kepala LPPM dan Ketua Program Studi	1. Bersama-sama dengan LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai; 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan adanya temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, atau penyimpangan;	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif

			4. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar; 6. Membuat laporan tertulis secara periodik dan melaporkannya kepada Rektor disertai saran dan rekomendasi.	
	3	Ketua LPM	1. Bersama-sama dengan Kepala LPPM dan Ketua Program Studi melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya; 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar yang menjadi tanggung jawabnya pada laporan; 3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan Kepala LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup unit.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif
5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pengendalian Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat - Daftar Hadir Rapat - Form Notulen Rapat - Form Perubahan Isi Standar - Form Tindakan Koreksi			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Manual ini meliputi siklus pelaksanaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) baik secara semesteran maupun tahun akademik atau juga secara periodik berdasarkan masa berlakunya Rencana Operasional dan Rencana Strategis.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM): tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain pada hasil pelaksanaan standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI), serta relevansinya dengan Visi dan Misi INBI.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk peningkatan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Tugas Rektor;
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</td><td>Surat Tugas Kelompok Kerja
SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPM</td><td>1. Menyediakan template buku standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Membentuk tim Kelompok Kerja untuk melakukan peningkatan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</td><td>Template Buku Standar
Dokumen pengendalian standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kelompok Kerja</td><td>1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya;
2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
3. Bersama-sama dengan Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut;
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya (Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat) terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
5. Merumuskan draf standar</td><td>Dokumen survei
Dokumen analisis SWOT
Dokumen uji publik</td></tr>
</table>

			Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD; 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	
	4	Wakil Rektor I	1. Bersama dengan Kelompok Kerja menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Draf Buku Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditingkatkan
5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat - Daftar Hadir Rapat - Form Survei - Form Perbaikan Berlanjut - Form Tindakan Koreksi			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			